

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Deputi IV BPKP.
- Coryanata, Isma. 2007. “*Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*”. Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar. Tanggal 26 – 28 Juli 2007.
- Council of Europe*. 2005. *Conference Gender Equality And Europe’s Future: Council of Europe*.
- Darise, Jim. 2006. *Janji Untuk Menjaga: Menggunakan Anggaran Public Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Hak Ecosob*. Jakarta: Pattiro.
- Eko, Sutoro. 2008. *Pro Poor Budgeting: Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan*. Yogyakarta: IRE.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Ardi. 2006. *Analisa Good Governance Dan Value For Money Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah: Sebuah Studi Interpretif (Studi Pada Organisasi Masyarakat Sipil Di Kota Mojokerto Dan Kabupaten Sidoarjo)*. Sidoarjo.
- Isharyanto. 2007. *Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Anggaran Daerah*. Surakarta: UNS.
- Jagat. 2006. *Skripsi: Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta: UII.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UNDP. 2007. *Factsheet. G-Help Issue VII*. Jakarta: UNDP.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhidin, S.A, Abdurahman, M. 2009. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Pustaka Setia: Bandung.
- Mulyana, B, Subkan, Slamet, K. 2006. *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. LPKPAP-BPPK: Jakarta.
- Pattinasarany, Daan, Candra Kusuma, 2006. *Transparansi, Partisipasi dan Pelayanan Publik di Kabupaten P2TPD: Temuan GDS Tahun 2006*.

DSF Working Paper. Jakarta: Government and Decentralization Survey.

Pemerintah Kota Surakarta. 2004. *Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*. Surakarta: Pemkot Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2010. *Perda Kota Surakarta No 7 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surakarta: Pemkot Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2010. *Perda Kota Surakarta No 14 tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun 2011*. Surakarta: Pemkot Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. 2011. *Profil Kota Surakarta*. URL: www.surakarta.go.id/public/download/profilkota.pdf.

Republik Indonesia. 2000. *Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2002. *Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2005. *Perpres No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2006. *Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.

- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2008. *Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No 12 Th 2008 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Legalitas. Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No 8 Th 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Legalitas.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Skripsi; Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UII.
- Setyadarma, Andryan. 2010. *Uji Asumsi Klasik dengan SPSS*. Semarang: FE UNNES.
- Sopannah. 2007. *Analiis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berperspektif Jender*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama di Surabaya. Tanggal 25 – 26 April 2007.
- Suhirman. 2004. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Tentang Partisipasi Warga Di Indonesia*. Bandung: Ford Foundation.
- Sukoco, Ade Dedi. 2007. *Panduan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah RI.
- Susmiyatun, Siti. 2008. *Kemungkaran Sosial Terhadap Perempuan Masa Kini*. Yogyakarta.
- Tim FPPM. 2008. *Partisipasi, Reformasi Kelembagaan dan Alokasi Anggaran: Pembelajaran dari 5 Daerah*. Surakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- Tim Pattiro Surakarta. 2007. *Memahami dan Mengkritisi APBD*. Surakarta: Pattiro Surakarta.
- Umar, Nasarudin. 1999. *Perspektif Jender Dalam Islam*. Jurnal Pemikiran Islam Paramadina. Jakarta: IAIN Jakarta.